

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA DASAR BERAS OLEH PERUM BULOG TERHADAP STABILITAS KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Muh. Syukur^{1*}, Muhammad Idrus², Syafridayani³, Devi Indha Humairah³

^{1,2,3,4} Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapi Bone

E-mail: akunmuhsyukur16@gmail.com^{1*}, muhammadidrus425@gmail.com², syafridayaniria@gmail.com³,
deviindhahm@gmail.com⁴

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received:12/01/2026

Revised:09/02/2026

Accepted:30/03/2026

Keywords: Rice basic price, perum bulog, financial stability, operations, government policy

Kata Kunci: Harga dasar beras, perum bulog, stabilitas keuangan, operasional, kebijakan pemerintah

ABSTRACT

The policy of setting a rice floor price or Government Purchasing Price (HPP) serves as one of the strategic instruments to protect farmers from harmful price fluctuations. However, the determination of HPP does not always have a positive impact on increasing farmers' income or improving Bulog's operational efficiency. Field conditions show a price disparity between what farmers receive and the consumer-level price, which often benefits traders or rice mills. The fluctuations in unhusked rice and rice prices within the operational area of Perum Bulog South Sulawesi, particularly in Bone Regency, also pose specific challenges in implementing the rice floor price policy. This study aims to analyze the impact of Perum Bulog's rice floor price policy on financial and operational stability at the Bone Branch Office of Perum Bulog. The analysis focuses on implications for income, risk of loss, liquidity, stock management, distribution, and relationships with farmers. The research method used is a quantitative descriptive approach by collecting secondary data from financial reports, rice and unhusked rice price data, as well as Bulog's operational data. The data are analyzed to identify the relationship between the HPP policy and financial stability indicators such as cash flow, profit margins, and distribution efficiency. The results of the study indicate that the rice floor price policy has a complex impact on financial and operational stability. On the one hand, the policy helps maintain unhusked rice prices at the farmer level from falling below the HPP, thereby increasing farmers' income and strengthening their relationship with Bulog. On the other hand, when market prices are far below the HPP, Bulog faces the risk of losses due to the obligation to purchase unhusked rice or rice at a higher price than the selling price, which ultimately affects liquidity and leads to stock accumulation.

ABSTRAK

Kebijakan harga dasar beras atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi salah satu instrumen strategis untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan. Meskipun demikian, penetapan HPP tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani maupun efisiensi operasional Bulog. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga antara yang diterima petani dan harga di tingkat konsumen, yang sering kali menguntungkan pedagang atau penggilingan. Fluktuasi harga gabah dan beras di wilayah kerja Perum Bulog Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan harga dasar beras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan harga dasar beras oleh Perum Bulog terhadap stabilitas keuangan dan operasional pada Perum Bulog Kantor Cabang Bone. Fokus analisis mencakup implikasi terhadap pendapatan, risiko kerugian, likuiditas, pengelolaan stok, distribusi, serta hubungan dengan petani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan, data harga gabah dan beras, serta data operasional Bulog. Data dianalisis untuk melihat hubungan antara kebijakan HPP dan indikator stabilitas keuangan seperti arus kas, margin keuntungan, serta efisiensi distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan harga dasar beras memiliki dampak yang kompleks terhadap stabilitas keuangan dan operasional. Di satu sisi, kebijakan ini mampu menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh di bawah HPP, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat hubungan dengan mereka. Di sisi lain, ketika harga pasar berada jauh di bawah HPP, Bulog menghadapi risiko kerugian akibat kewajiban membeli gabah atau beras dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan penumpukan stok.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan dataran luas sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya subsektor pangan penghasil beras. Abdurrozzaq (2022:47) Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia harus dikelola dan dijaga dengan baik sebagai upaya dalam menunjang kebutuhan beras nasional. Terpenuhinya persediaan beras merupakan hal yang sangat baik untuk kestabilan harga pangan sehingga akan memperlancar perekonomian Indonesia. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Perum Bulog untuk mengawasi tata niaga beras, mulai dari pengadaan hingga pemenuhan kebutuhan nasional, memastikan kualitas dan stabilitas harga (Proborini, Ekowati, and Sumarjono (2018:12). Peran Bulog dalam stabilitas harga juga dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, beras merupakan komoditas yang memiliki nilai strategi, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, maupun politik. Dalam konteks ketahanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga beras menjadi salah satu tidak penting dalam ketahanan pangan sebagai salah satu keutamaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi Indonesia, beras selalu dihargai sebagai komoditas ekonomi, sosial, sekaligus politik. Dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah dan beras melalui pengolahan cadangan pemerintah.

Penegakan dan Pengawasan Selain undang-undang ini, ada juga lembaga seperti Bulog (Badan Urusan Logistik) yang berperan dalam pengawasan dan stabilisasi harga beras di pasar. Intervensi pasar juga dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan beras tepat waktu. Secara keseluruhan, kerangka hukum dan kebijakan ini

bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Beras sebagai komoditas strategis sangat sarat dengan campur tangan pemerintah, antara lain kebijakan pemerintah terkait aspek produksi, distribusi, perdagangan internasional, maupun kebijakan harga. Kebijakan harga berupa harga pembelian atau harga dasar dan BULOG harga eceran merupakan dua bentuk intervensi pemerintah terhadap harga yang memiliki implikasi langsung dan tidak langsung pada kesejahteraan petani. Peningkatan produktivitas padi selain untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk Indonesia juga untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani mengingat sebagian besar petani mengusahakan tanaman padi. Akan tetapi, pada kenyataannya peningkatan produktivitas padi belum mampu meningkatkan pendapatan (kesejahteraan) petani.

Kebijakan penetapan harga dasar beras oleh Perum Bulog bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan mendukung petani. Namun, dampaknya terhadap stabilitas keuangan dan operasional perlu dianalisis secara mendalam, terutama di tingkat cabang seperti Perum Bulog Kantor Cabang Bone. Dampak terhadap Stabilitas Keuangan Peningkatan Pendapatan. Harga dasar yang ditetapkan dapat meningkatkan pendapatan Perum Bulog jika harga pasar berada di bawah harga dasar. Risiko Kerugian. Jika harga pasar tetap rendah, Perum Bulog mungkin mengalami kerugian karena harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual. Likuiditas. Kebijakan ini dapat mempengaruhi arus kas, terutama jika terjadi penumpukan stok beras yang tidak terjual. Dampak terhadap Operasional. Stok dan Distribusi. Penetapan harga dasar dapat mempengaruhi keputusan pengadaan dan distribusi beras. Jika harga tidak menguntungkan, stok mungkin tidak terdistribusi dengan baik. Berkaitan dengan upaya stabilisasi harga gabah di tingkat petani produsen, pemerintah menetapkan kebijakan jangka pendek berupa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk mengatur mekanisme penetapan harga transaksi baik di tingkat petani maupun penggilingan. R Adhawiah (2024:13).

Pihak yang paling diuntungkan dalam kondisi ini adalah penggilingan dan pedagang. Harga beras premium yang terus meningkat menyebabkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan beras dengan kualitas terbaik semakin menurun. Jika fluktuasi harga yang cepat dengan kecenderungan yang meningkat tidak diprediksi oleh perintah berpotensi menimbulkan masalah ketahanan pangan di masa depan, namun harga pembelian pemerintah (HPP) mengenai beras yang ada di kabupaten bulukumba selalu mengalami fluktuasi harga atau naik

turunnya harga dari bulan ke bulan bahkan pertahunnya.

Pada tahun 2022 dan 2023 di wilayah kerja Perum Bulog Sulawesi Selatan, terjadi fluktuasi harga gabah dan harga beras. Harga beras Bulog terbaru di Kabupaten Bone bervariasi tergantung. M Darwin Fatir (2025:2). Sementara itu, Beras Kita Premium Bulog dijual dengan harga Rp 68.000 untuk 5 kg dan Rp.130.000 untuk 10 kg. Berikut adalah rincian lebih lanjut. Beras SPHP. Harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP adalah Rp. 12.500 per kilogram, atau Rp. 62.500 untuk kemasan 5 kg. Di pasaran, mitra Bulog menjual beras SPHP dengan harga sekitar Rp. 60.000 - Rp62.000 per 5 kg. Selain SPHP dan Kita Premium, Bulog juga menjual berbagai jenis beras lain dengan harga yang bervariasi, seperti Beras Bulog Medium, Hukum permintaan dan penawaran akan selalu mempengaruhi harga dipasar atau pada tingkat konsumen.

Efisiensi Operasional Perum Bulog perlu menyesuaikan rencana operasionalnya untuk mengatasi perubahan dalam permintaan dan penawaran akibat kebijakan harga. Hubungan dengan Petani Kebijakan ini bisa memperkuat hubungan dengan petani, tetapi juga bisa menyebabkan ketidakpuasan jika harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Analisis Risiko fluktuasi Harga Pasar Perum Bulog harus siap menghadapi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan penjualan.

Ketersediaan dana dan sumber daya manusia untuk mengelola operasi akan menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan. Kebijakan penetapan harga dasar beras memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan operasional Perum Bulog Kantor Cabang Bone. Untuk meminimalkan risiko, disarankan agar Perum Bulog Melakukan analisis pasar secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan harga.1) Meningkatkan efisiensi dalam pengadaan dan distribusi beras. 2). Memperkuat komunikasi dengan petani untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Dengan langkah-langkah ini, Perum Bulog dapat menjaga stabilitas finansial dan operasional yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan harga dasar beras merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah melalui Perum BULOG memiliki peran strategis dalam menetapkan harga dasar guna melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, serta memastikan ketersediaan beras sebagai komoditas pangan utama. Dalam konteks ini, harga dasar beras

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekonomi, tetapi juga sebagai alat pengendalian inflasi dan stabilitas sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga komoditas pangan memiliki dampak signifikan terhadap struktur pasar dan kinerja lembaga pelaksana. Kebijakan harga dasar yang diterapkan oleh BULOG berpotensi memengaruhi mekanisme distribusi, pengadaan, serta manajemen stok beras nasional. Di satu sisi, kebijakan ini mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani, namun di sisi lain dapat menimbulkan tekanan terhadap efisiensi operasional lembaga apabila tidak diimbangi dengan manajemen logistik dan keuangan yang optimal. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak kebijakan ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi mikro maupun makro.

Dari perspektif keuangan, penetapan harga dasar beras berkaitan erat dengan keberlanjutan finansial Perum BULOG sebagai badan usaha milik negara. Kebijakan harga yang terlalu tinggi dapat meningkatkan beban subsidi dan biaya pengadaan, sedangkan harga yang terlalu rendah berisiko menurunkan insentif produksi bagi petani. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan dalam penetapan harga agar tidak menimbulkan defisit operasional yang berkepanjangan. Studi sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran, optimalisasi rantai pasok, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk menjaga stabilitas finansial lembaga.

Selain aspek keuangan, dampak kebijakan harga dasar juga terlihat pada aspek operasional, khususnya dalam pengelolaan logistik dan distribusi beras. Perum BULOG dihadapkan pada tantangan dalam menjaga ketersediaan stok, mengelola gudang, serta memastikan distribusi yang merata hingga ke daerah terpencil. Kebijakan harga dasar yang tidak selaras dengan kondisi pasar dapat menyebabkan penumpukan stok atau bahkan kekurangan pasokan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan operasional lembaga dalam merespons dinamika permintaan dan penawaran.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga dasar beras oleh Perum BULOG memiliki implikasi yang kompleks terhadap stabilitas keuangan dan operasional. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara kebijakan harga, kinerja keuangan, dan efektivitas operasional dalam satu kerangka analisis terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan

harga dasar beras terhadap keberlanjutan fungsi BULOG dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, membagikan kuesioner, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan dan rekaman. Objek Penelitian ini berlokasi di Perum Bulog Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.35 Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu April sampai dengan Juni 2025. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumen. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Bulog yang ada di Kabupaten Bone. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip- arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan oleh peneliti sendiri dan pengumpulan data sekunder melalui observasi atau kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data tidak secara langsung di lapangan, data diperoleh dari pihak lain yang sudah mengumpulkannya terlebih dahulu, serta data yang di dokumentasikan. Secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun beberapa langkah- langkah analisis data sebagai berikut: yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam wawancara dengan Andi Ishak (32 tahun), Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan Perum Bulog Cabang Bone, ia menjelaskan “bahwa proses penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah maupun beras bukanlah kewenangan Bulog, melainkan ditetapkan langsung oleh pemerintah. “Bulog hanya menjalankan kebijakan tersebut di lapangan. Saat ini, harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp6.500 per kilogram. Jadi Bulog hanya mengikuti aturan yang berlaku,” ungkapnya”. Ketika ditanyakan mengenai kesesuaian harga tersebut dengan kondisi pasar lokal di Bone, Andi menegaskan bahwa “kebijakan ini sudah cukup tepat. Menurutnya, harga Rp6.500 per kilogram sesuai dengan kondisi pasar dan dapat diterima oleh petani di wilayah Bone. “Harga yang ditetapkan pemerintah

itu cukup relevan dengan kondisi pasar di sini, sehingga tidak menimbulkan perbedaan signifikan antara harga pasar dan harga yang diberlakukan Bulog,” jelasnya

Dari sisi keuangan, Andi menjelaskan bahwa sumber dana pembelian gabah berasal dari dana kredit dan dana pemerintah yang dikelola secara terpusat, sementara kantor cabang hanya menerima dana dropping dari pusat. Menurutnya, kebijakan HPP ini berdampak pada meningkatnya volume penyerapan gabah oleh Bulog sehingga aktivitas operasional juga bertambah. “Konsekuensinya, biaya operasional kantor cabang ikut meningkat, bahkan sering kali stok gabah atau beras yang masuk melebihi kapasitas gudang. Kami sampai harus menyewa gudang tambahan untuk menampungnya, yang tentu menambah beban biaya,” ujarnya

Di akhir wawancara, Andi menyoroti pentingnya strategi dan solusi jangka panjang. Ia menyebutkan bahwa Bulog berupaya mengakomodir hasil panen petani dengan penyewaan gudang tambahan, sekaligus melakukan edukasi kepada petani dan mitra penggilingan mengenai kebijakan harga. Untuk rekomendasi perbaikan, ia menekankan perlunya sinergi dengan berbagai pihak agar petani dapat meningkatkan kualitas hasil panennya. “Jika kualitas gabah semakin baik, maka beras yang dihasilkan Bulog juga akan lebih berkualitas, dan kebijakan harga dasar yang ada akan semakin efektif di masa mendatang,” tutupnya.

Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Pengadaan Beras (SATGAS ADA DN) di Perum Bulog.

1. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Tugas Pengadaan Beras (SATGAS ADA DN) ini disusun sebagai petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Beras melalui SATGAS ADA DN yang dilaksanakan oleh Divisi Regional (Divre), Sub Divisi Regional (Subdivre) dan Kantor Seksi Logistik (Kansilog). Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Organisasi SATGAS, Pola Operasi, Pendanaan, Pertanggungjawaban serta Pengawasannya.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Tugas Pengadaan Beras (SATGAS ADA DN) Di Perum Bulog adalah agar pelaksanaan Pengadaan Beras melalui SATGAS ADA DN dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

- Sebagai alat standarisasi kegiatan Pengadaan Beras Perum Bulog Melalui SATGAS ADA DN.

- Sebagai acuan dalam pelaksanaan Beras Perum Bulog yang bermanfaat untuk pengukuran Kinerja
 - Sebagai alat control proses untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dan dapat dievaluasi hasilnya.
 - Untuk mendukung terciptanya pengelolaan Pengadaan Beras Perum Bulog agar lebih efektif, efisien, konsisten, dan sistematis
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Kedudukan

Satuan Tugas Pengadaan yang selanjutnya dalam SOP ini disingkat SATGAS ADA DN, berkedudukan di Divre, Subdivre, Kansilog yang dibentuk oleh Kedivre, Kasubdivre, Kakansilog sesuai dengan kebutuhan operasional daerahnya.

Tugas

Kedudukan SATGAS ADA DN yang tersebar di Divre, Subdivre, dan Kansilog menunjukkan perannya yang strategis dalam mengamankan stok beras nasional. Melalui tugas utamanya, yaitu pembelian beras sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga rafaksi serta pengolahan beras sesuai standar kualitas pengadaan dalam negeri, SATGAS berperan sebagai garda depan dalam menjaga kualitas dan kuantitas beras yang masuk ke gudang Bulog. Fungsi-fungsi SATGAS ADA DN mencakup pembelian, pengangkutan, pengolahan, serta penyerahan beras ke gudang yang telah ditunjuk. Rangkaian fungsi ini membentuk siklus kerja yang saling terkait dan menentukan keberhasilan operasional pengadaan beras. Pelaksanaan fungsi secara optimal akan mendukung misi Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan beras, menstabilkan harga, dan memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat.

SATGAS ADA DN memiliki peran strategis dalam mendukung operasional Perum Bulog, khususnya dalam memastikan ketersediaan beras dengan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pembelian beras dari berbagai sumber yang memenuhi kriteria pengadaan. Proses pembelian ini menjadi tahap awal yang menentukan kualitas dan kuantitas beras yang akan masuk ke rantai pasok Bulog. Setelah proses pembelian, SATGAS ADA DN bertanggung jawab atas pengangkutan beras dari lokasi pembelian ke tempat pengumpulan atau pengolahan. Fungsi ini sangat penting untuk menjamin kelancaran logistik dan

mencegah penurunan kualitas beras selama proses transportasi. Efektivitas pengangkutan akan mempengaruhi efisiensi biaya dan waktu distribusi.

Fungsi berikutnya adalah pengolahan beras agar sesuai dengan persyaratan kualitas pengadaan dalam negeri (DN) yang telah ditetapkan Perum Bulog. Proses pengolahan mencakup pembersihan, pengeringan, dan pengemasan beras sehingga memenuhi standar kualitas seperti kadar air dan kebersihan yang ditetapkan. Tahap ini krusial untuk memastikan beras layak disimpan dan siap didistribusikan.

Tata cara Pemeriksaan kualitas Gabah, Beras dan Kemasannya merupakan bagian dari proses penerimaan barang di gudang, oleh karenanya pedoman teknis ini hendaknya dipahami, dikuasai dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat pelaksana agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Persyaratan kuantitatif beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasannya Apabila dalam pemeriksaan kemasan Gabah/beras menunjukkan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka:

- untuk pemeriksaan yang dilakukan di depan pintu gudang, penolakan dilakukan terhadap party barang yang berada diatas alat angkut/truk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Untuk pemeriksaan yang dilakukan penggilingan Mitra, penolakan dilakukan terhadap party barang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Terhadap penolakan sebagaimana butir a dan b di atas pemeriksaan isi barang tidak perlu dilanjutkan, kemudian petugas Pemeriksa Kualitas membuat Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK).

Tata Cara pemeriksaan kualitas Gabah:

- Pemeriksaan hama dan penyakit, bahan yang diperiksa adalah gabah waktu di curah dari karung sampel.
- Pemeriksaan dilakukan secara visual dengan pertolongan kaca pembesar atau alat lain yang di perbolehkan.
- Pemeriksaan bau. Bahan yang diperiksa adalah gabah waktu dicurah dari karung sampel, dan pemeriksaan dilakukan dengan melakukan indera penciuman.
- Pemeriksaan adanya bahan kimia yang berbahaya, yaitu bahan yang diperiksa adalah gabah waktu yang dicurah dari karung sampel, dan pemeriksaan dilakukan secara

visual atau dengan cara pemeriksaan indera penciuman.

- Pemeriksaan kadar air. Kadar Air, diperiksa dengan menggunakan sampel Primer pada temperatur gabah normal.

Cara pemeriksaan:

Dengan elektronik moisture tester yang telah di kalibrasi. Bahan yang diperiksa adalah gabah bersih bebas hampa/kotoran. Pemeriksaan dilakukan minimal 3 kali ulangan. Dalam setiap kali ulangan pemeriksaan tidak diperkenankan ada yang melampaui batas ketentuan persyaratan kualitas yang telah ditentukan (kadar air ditetapkan maksimal 14%). Apabila didapatkan 2 kali ulangan pemeriksaan memenuhi persyaratan dan 1 kali ulangan diatas ketentuan, walaupun rata-ratanya 14% maka barang tersebut harus ditolak.

Sampel Ditolak:

Ulangan 1: Kadar Air 13,00 %

Ulangan 2: Kadar Air 15,00 %

Ulangan 3: Kadar Air 14,00 %

Tugas Bulog Terkait dengan Pengendalian Harga Beras

Operasi Pasar Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras atau gabah baik pada petani dan masyarakat Kabupaten Bone, Bulog melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras serta distribusinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Bulog melakukan strategi yang dapat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras, Perum Bulog memiliki strategi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bone dengan melakukan Operasi pasar. Operasi pasar biasanya dilakukan untuk menambah jumlah pasokan beras 49 melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada para konsumen.

Perlu dijelaskan bahwa saat ini ada dua kegiatan yang menggunakan Cadangan Beras Pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga, yaitu melalui Operasi Pasar dan Operasi Pasar Khusus. Sasaran kedua kegiatan tersebut berbeda. Operasi pasar merupakan upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum. Dilakukan melalui Satgas untuk langsung dijual ke masyarakat umum; melalui pedagang eceran dan pedagang grosir, pedagangpedagang tersebut wajib menjual Beras OP CBP pada harga ecetan tertinggi yang telah di tetapkan.

Sedangkan OPK CBP dengan sasaran Rumah Tangga Saran dari program Raskin sebanyak 15,5 juta RT dengan alokasi 15 kg. untuk OPK CBP ini, Bulog bekerjasama dengan Pemerintah setempat untuk langsung menyalurkan kepada sasaran. Dengan

demikian, dimungkinkan adanya stok beras di gudang pedagang, namun itu merupakan beras Operasi Pasar reguler dan bukan Operasi Pasar Khusus yang jenis dan labelnya sama yaitu beras medium. Diharapkan beras tersebut dapat langsung didistribusikan ke pedagang eceran untuk dijual ke masyarakat umum.

Operasi Pasar dilihat dari sasaran Khususnya

Operasi Pasar Khusus I

Merupakan operasi pasar yang bertujuan membantu masyarakat di daerah tertentu yang rawan daya beli dan oleh sebab itu harga penjualan beras disesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat dan dilaksanakan oleh Satgas OP Divre/Subdivre. Prosedur penyalurannya adalah sebagai berikut:

- Operasi Pasar Khusus I dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020 atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur, permintaan tersebut dapat dilakukan secara langsung ke Direksi atau melalui Kadivre dengan menyebutkan secara jelas dan terinci daerah, harga dan kuantum yang dibutuhkan.
- Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bulog, Kadivre menerbitkan Surat Perintah pembentukan Satgas OP Khusus I dan selanjutnya melaksanakan OP Khusus I dengan menerbitkan DO.
- Atas dasar DO yang telah diterbitkan satuan kerja yang membidangi akuntansi membukukan sebagai Piutang Satgas OP Khusus I.
- Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan OP Khusus I yang telah ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat, diterbitkan SPS kepada Satgas. Bukti setor yang diterima oleh Satgas diserahkan kepada satuan kerja yang membidangi 55 akuntansi untuk dicatat sebagai pengurangan piutang Satgas OP Khusus I. Sisa beras yang tidak terjual dikembalikan ke gudang sesuai prosedur pemasukan beras di gudang dan dicatat sebagai pengurangan piutang oleh satuan kerja yang membidangi akuntansi.
- Dolog mendebet-notakan ke Bulog selisih HPB untuk OP Khusus I dengan harga buku beras untuk diselesaikan dengan Departemen Keuangan.
- Untuk penyelesaian penagihan selisih HPB OP Khusus I dengan harga buku beras tersebut, harus dilengkapi dengan rekapitulasi berita acara pelaksanaan OP Khusus I yang ditandatangani oleh Pemda setempat. Divre mengirimkan rekapitulasi BA pelaksanaan OP Khusus I tersebut ke Divisi Penyaluran (asli) dan tembusan dikirim ke Divisi Pembiayaan dan Divisi Akuntansi

Operasi Pasar Khusus II

Adalah operasi pasar yang bertujuan membantu masyarakat di daerah tertentu yang sangat lemah daya beli dan oleh sebab itu diberikan secara cuma-cuma. Pelaksanaannya dilakukan oleh Satgas OP Divre atau Subdivre bekerjasama dengan aparat-aparat Pemerintah setempat. 56 Prosedur penyalurannya sebagai berikut:

- a) Operasi Pasar Khusus II dilaksanakan atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur. Permintaan tersebut dapat dilakukan secara langsung ke Direksi Bulog atau melalui Kadivre dengan menyebutkan secara jelas dan terinci daerah, kuantum dan jumlah penduduk serta alasan yang mendukung.
- b) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Bulog, Kadivre menerbitkan Surat Perintah pembentukan Satgas OP Khusus II dan selanjutnya melaksanakan OP Khusus II dengan menerbitkan DO.
- c) Atas dasar DO yang telah diterbitkan satuan kerja yang membidangi akuntansi membukukan sebagai piutang OP Khusus II. Sisa beras yang tidak tersalurkan dikembalikan ke gudang sesuai prosedur pemasukan beras di gudang dan dicatat sebagai pengurangan piutang oleh satuan kerja yang membidangi akuntansi.
- d) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan OP Khusus II yang ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat, Divre mendebet-notakan ke Bulog harga beras untuk OP Khusus II tersebut sebesar jumlah kuantum yang disalurkan dikalikan dengan harga buku beras untuk diselesaikan dengan Departemen Keuangan.
- e) Penyelesaian penagihan harga beras untuk keperluan OP Khusus II, harus dilengkapi dengan rekapitulasi berita acara pelaksanaan OP Khusus II yang ditandatangani oleh Pemda setempat. Divre mengirimkan rekapitulasi BA pelaksanaan OP Khusus tersebut ke Divisi Penyaluran (asli) dan tembusan dikirim ke Divisi Pembiayaan dan Divisi Akuntansi.
- f) pelaksanaan Operasi Pasar khusus II dilaksanakan setiap bulan hingga saat ini.

Kondisi Lahan Pertanian di Kabupaten Bone

Kondisi lahan pertanian di Kabupaten Bone pada tahun 2025 mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru, luas lahan sawah baku tercatat mencapai sekitar 110.760 hektare, menjadikan Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan luas sawah tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total tersebut, sekitar 43.508 hektare merupakan

sawah irigasi dan 67.252 hektare merupakan sawah nonirigasi atau tadah hujan. Kecamatan Libureng dan Bengo menjadi penyumbang terbesar luas lahan sawah, masing-masing dengan luasan lebih dari 7.000 hektare.

Peningkatan luas lahan sawah ini didukung oleh program pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lahan, seperti konversi lahan rawa menjadi sawah produktif seluas 5.000 hektare pada tahun 2024 serta cetak sawah baru seluas 583 hektare pada tahun 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga menargetkan penambahan luas tanam baru (LTT) sebesar 43.000 hektare pada 2025, sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga tiga kali setahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, data lahan pertanian non-sawah seperti perkebunan, ladang, padang penggembalaan, dan hutan rakyat belum tersedia secara rinci untuk tahun 2025. Namun, diperkirakan luasan kebun masih menjadi bagian terbesar dari kategori lahan non-sawah, sebagaimana tren tahun-tahun sebelumnya. Perluasan dan intensifikasi pertanian di lahan bukan sawah juga menjadi bagian dari strategi peningkatan hasil produksi dan pemanfaatan lahan yang lebih maksimal, terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi atau lahan kering.

Dalam hal produksi, Kabupaten Bone mencatatkan lonjakan signifikan sepanjang Januari hingga April 2025 dengan produksi gabah kering giling mencapai 319.272 ton, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi beras juga menunjukkan tren positif, yakni sebesar 183.210 ton. Meski demikian, terdapat perbedaan data antara BPS dan Dinas Tanaman Pangan terkait produktivitas padi per hektare. BPS mencatat rata-rata 47,79 kuintal/ha, sedangkan DTPH mengklaim mencapai 64,77 kuintal/ha. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar kebijakan pembangunan pertanian yang lebih akurat dan efektif.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Bone. Kuantitas dan Kualitas Beras. Semakin baik kualitas beras, maka akan semakin tinggi harga beras tersebut. Semakin sedikit jumlah stok beras yang ada di pasaran, maka harga beras tersebut akan semakin tinggi. Kuantitas beras secara keseluruhan baik kualitas rendah atau kualitas baik jumlahnya menurun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas beras sebagai berikut:

Cuaca/Iklim

Musim tanam (MT) padi I dan II memperoleh hasil yang tidak maksimal. Hal tersebut diakibatkan perubahan

cuaca. Perubahan cuaca tersebut mengakibatkan serangan hama wereng, tikus serta terendahnya sejumlah lahan pertanian. Tanaman padi yang terendam mengakibatkan petani melakukan panen awal dari waktu yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan bila terlalu lama terendam, tanaman padi akan roboh dan mengakibatkan busuk. Tanaman padi yang terendam menyebabkan kadar air (KA) gabah tinggi, serta kondisi lingkungan yang sering hujan mendung mengakibatkan masa jemur gabah berkurang. Gabah yang dalam keadaan basah bila disimpan dapat menjamur dan gabah yang memiliki KA tinggi bila digiling bisa menyebabkan butir padi patah. Dengan semakin banyaknya petani yang mengalami kerusakan pada lahan pertaniannya mengakibatkan beras yang beredar di pasaran memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari masa panen yang 70 sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan semakin tingginya harga beras yang layak konsumsi.

Pupuk

Banyak petani di Kabupaten Bone yang selalu menggunakan pupuk anorganik(urea) daripada pupuk organik atau pemupukan berimbang, dengan alasan pemupukan anorganik lebih murah, lebih praktis. Padahal kalau hanya mengandalkan pupuk urea dalam pemupukan akan menghasilkan bulir padi yang kurang berisi, batang dan akar yang lemah, yang mengakibatkan tanaman padi mudah roboh kalau terkena angin kencang dan hujan deras. Hasilnya gabah atau beras yang dihasilkan mudah patah dan menjadi menir, serta warna berasnya kusam. Dengan demikian beras dengan kualitas medium keatas jumlahnya menjadi berkurang atau langka membuat harga beras mengalami kenaikan.

Langkah-langkah Yang Ditempuh BULOG Dalam Pengendalian Harga Beras.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh BULOG dalam pengendalian harga beras adalah sebagai berikut.

- Operasi pasar dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras baik pada petani dan masyarakat Kabupaten Bone, BULOG melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras serta distribusinya. Untuk itu, BULOG dapat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras dengan strategi yang dimiliki oleh Perum BULOG yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan melakukan operasi pasar. Operasi pasar biasanya dilakukan untuk menambah jumlah

pasokan beras melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada para konsumen

- Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang dimulai sejak 1998 sebagai respons terhadap krisis moneter, telah mengalami beberapa transformasi nama dan bentuk. Awalnya disebut Operasi Pasar Khusus (OPK), program ini berubah menjadi Raskin pada tahun 2002 dan kemudian menjadi Rastra pada tahun 2017. Tujuan utamanya tetap konsisten, yaitu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Raskin berperan penting dalam mengurangi permintaan beras di pasar terbuka, karena keluarga penerima telah tercukupi kebutuhannya dari program ini.
- Sejak 2020, pemerintah telah mengalihkan program Rastra menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), seiring upaya untuk menyalurkan bantuan sosial secara lebih fleksibel dan akuntabel. Pada tahun 2025, BPNT mencakup sekitar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan yang dapat dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan pangan seperti beras, telur, ikan, dan sayuran. Dengan sistem ini, keluarga penerima memiliki keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan pangan sesuai preferensi masing-masing, tidak terbatas hanya pada beras seperti dalam program Raskin sebelumnya.
- Penyaluran BPNT tahun 2025 dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terbaru. Dengan pembaruan data ini, pemerintah memastikan penyaluran lebih tepat sasaran, termasuk mengeluarkan sekitar 1,8 juta KPM yang tidak lagi memenuhi syarat dan menggantinya dengan penerima baru dari kelompok masyarakat berpenghasilan terendah. Program ini merupakan kelanjutan dari semangat Raskin yang kini lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial dan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan ekonomi

Kendala-Kendala BULOG Dalam Pengendalian Harga Bera

Adapun kendala yang di alami BULOG dalam melakukan pengendalian harga di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- Operasi Pasar akan dilaksanakan setelah adanya permintaan dari Pemerintah daerah

setempat, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota. Pemerintah Kabupaten Bone berpatokan akan mengajukan dilaksanakannya Operasi Pasar ke BULOG sebelum memasuki hari-hari besar (seperti bulan Ramadhan) dan ketika harga beras mengalami kenaikan dan telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Kendala dalam melaksanakan OP lebih sering mengarah ke proses dalam pelaksanaan jual belinya. Operasi Pasar beras yang digelar biasanya dilaksanakan di pasar-pasar tradisional setempat dan banyak orang yang mengerubungi Satgas Operasi Pasar. Dan bahkan, terlebih di daerah Kota lain, ketika Satgas melakukan Operasi Pasar, para pemuda setempat dari berbagai ormas meminta jatah beras secara gratis dengan dalih untuk menjaga keamanan para anggota Satgas. Tidak adanya rasa kesabaran dan takut akan habisnya beras yang dijual oleh Satgas mengakibatkan terjadinya kesemrawutan karena para pembeli merasa dirinya yang harus lebih dahulu dilayani tanpa harus mengantri. Dengan melakukan penjualan secara eceran, para pembeli hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 15 Kg per orang. Dan, Satgas BULOG harus terlebih dahulu menyediakan bungkusan beras seberat 5 Kg terlebih dahulu sebelum OP mulai dilaksanakan.

- Rastra (Beras Sejahtera)
Kurangnya data mengenai masyarakat kurang mampu (miskin) yang dimiliki oleh Pemda setempat, membuat penyaluran rastra tidak tepat sasaran. Dan kurangnya rasa empati masyarakat yang lebih berkecukupan daripada yang seharusnya lebih pantas menerima rastra, semakin memperkeruh keadaan. Harga yang lebih miring menjadi alasan masyarakat yang lebih berkecukupan memilih untuk membeli rastra dari yang seharusnya lebih pantas menerima rastra tersebut. Lalu terkadang dalam 12 kali penyaluran rastra tiap tahun, dalam salah satu atau lebih penyalurannya, pengajuan pelaksanaan penyaluran rastra oleh Pemda setempat diserahkan secara mendadak dengan hari pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan pihak BULOG harus menyiapkan segala sesuatunya dengan waktu yang tidak banyak alias mepet. Mulai dari transportasi, administrasi dan stok beras di kerjakan secara terburu-buru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jika ada indikasi harga sudah melonjak dipasar, maka Bulog turun ke pasar melakukan Operasi Pasar dengan harga jual dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Penetapan Harga Dasar Beras (HDB) oleh Perum Bulog, yang merupakan jaring pengaman harga di tingkat petani dan penyangga pasokan pangan, berdampak pada stabilitas keuangan dan operasional kantor cabang Perum Bulog di Bone. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi konsumen, sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Faktor pendukung dalam stabilisasi harga gabah dan beras di tingkat produsen adalah instansi terkait membantu dalam pelaksanaan pengadaan, mitra dan satgas ADA DN, dana yang cukup, gudanggudang penyimpanan yang tersedia dan kualitas beras yang memenuhi persyaratan. Sedangkan Faktor penghambat dalam stabilisasi harga gabah dan beras di tingkat produsen adalah harga pembelian pemerintah yang ditetapkan terlalu kaku dan tidak mengikuti perkembangan pasar serta sedikitnya jumlah produksi beras medium yang dapat diserap oleh Perum Bulog, para tengkulak ataupun pedagang menimbun gabah dan beras, yang dapat menyebabkan harga naik

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Irfan. 2017. Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Beras pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat. *Jurnal String*. Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjajaran. 2(1):10- 17.
- Arjayani, Syam. 2010. Analisis Kebijakan Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Propinsi DIY. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 15 No.2. Hal 17-34
- Arifin, Dwi Rahmawanti. 2018. Analisis Fluktuasi Dan Stabilisasi Harga Beras Di Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Aryani, Desi. 2021. Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan. *Jurnal Pangan*. Vol. 30 No. 2. Hal. 75- 86.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.2021. Sumatera Selatan dalam Angka 2019-2020. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. 2022. Sumatera Selatan dalam Angka 2019-2020. Sumatera Selatan: Dinas Perdagangan.
- Febriani, Dhanny Novita. 2006. Peran Perum BULOG Subdivre Kediri Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Melalui Pengadaan Beras. Tesis. Jawa Timur. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Haq, Muh. Nasrul. 2021. Evaluasi Kinerja Perum BULOG Dalam Pengendalian Harga Beras Di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mardiah, Zahara. 2016. Evaluasi Mutu Beras untuk Menentukan Pola Preferensi Konsumen di Pulau Jawa. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*. Vol. 35 No. 3.
- Musri, Nathasia Aviola. 2016. Analisis Peran Perusahaan Umum BULOG Dalam Stabilisasi Harga Di Tingkat Produsen Dan Konsumen Pada Wilayah Kerjanya. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.
- Nasrul, Muh. 2021. Evaluasi Kinerja Perum BULOG Dalam Pengendalian Harga Beras Di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nildawati, Ratianingsih, dan Sahari. 2018. Pengaturan Persediaan Beras di Perum BULOG Divre Sulteng Dengan Metode Economy Order Quantity (EOQ). *Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan [online]*, 15(20):(220-237)
- Rosyadi, Imron dan Didit Purnomo. 2012. Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Desa Tertinggal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 35 No. 2. Hal. 303-315.
- Sugiarto, D. 2002. Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. PT Gramedia Pustaka Ulama. Jakarta. 414 hal.
- Sukirno, S. 2001. Pengantar Teori Mikroekonomi Jilid 3. PT RajaGrafindo Prasada. Jakarta. 430 hal.
- Supranto, J. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1. Erlangga. Jakarta. 370 hal
- Surindah, A. 2021. Analisis Stabilitas Harga Gabah pada Tingkat Petani Menurut Harga Pembelian Pemerintah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Suryana. 2014. Dinamika Kebijakan Harga Gabah Dan Beras Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Pengembangan Pertanian*. Vol. 7 No. 4. Hal. 155-168.
- Triadi, Yuli. 2021. Evaluasi Kinerja Perum BULOG Dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus Di Kabupaten Demak). Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Undang-undang Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Yunita Sari. 2022. Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Beras Di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Medan Are.